

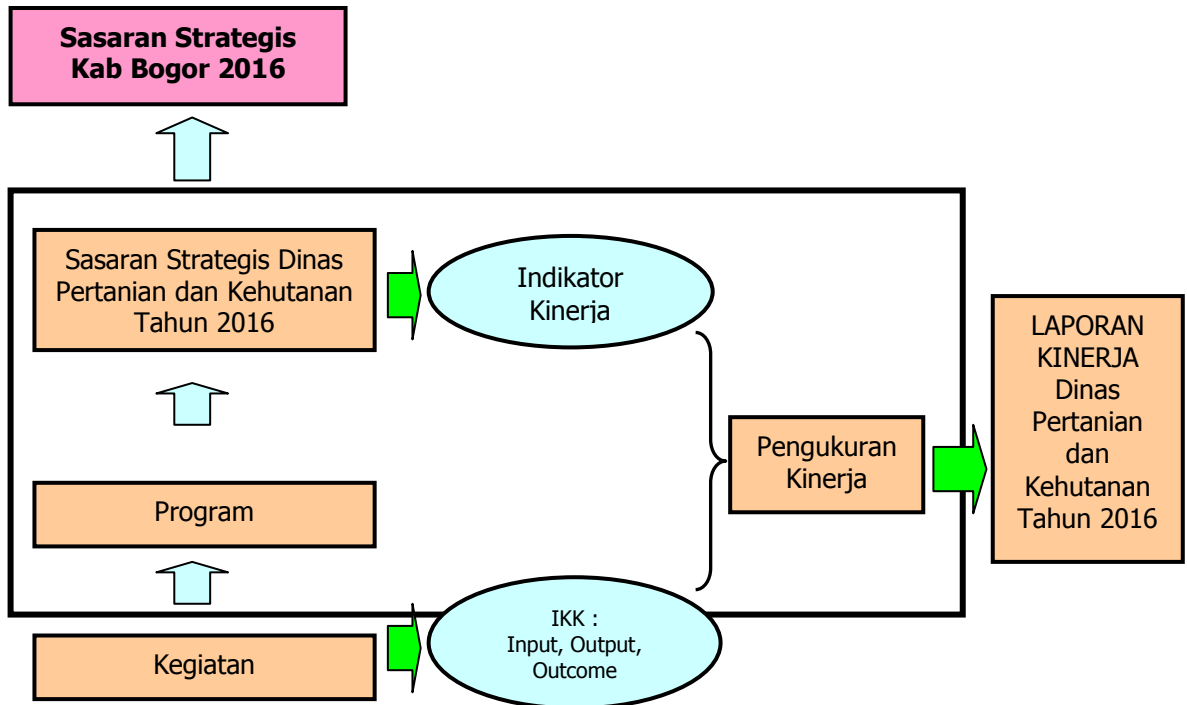
BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2016 kepada Bupati Bogor, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor menyusun Laporan Kinerja tahun 2016. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2016 berasal dari APBD Kabupaten Bogor dan APBN Tahun Anggaran 2016.

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2016. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa *output* dan atau *outcome* kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tahun 2016. Gambaran pengukuran kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tahun 2016 dalam pencapaian pengukuran

kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2016, disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alur Pikir Pengukuran Kinerja

Metode penyusunan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tanggal 20 November 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas Pokok

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanian dan kehutanan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan.

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

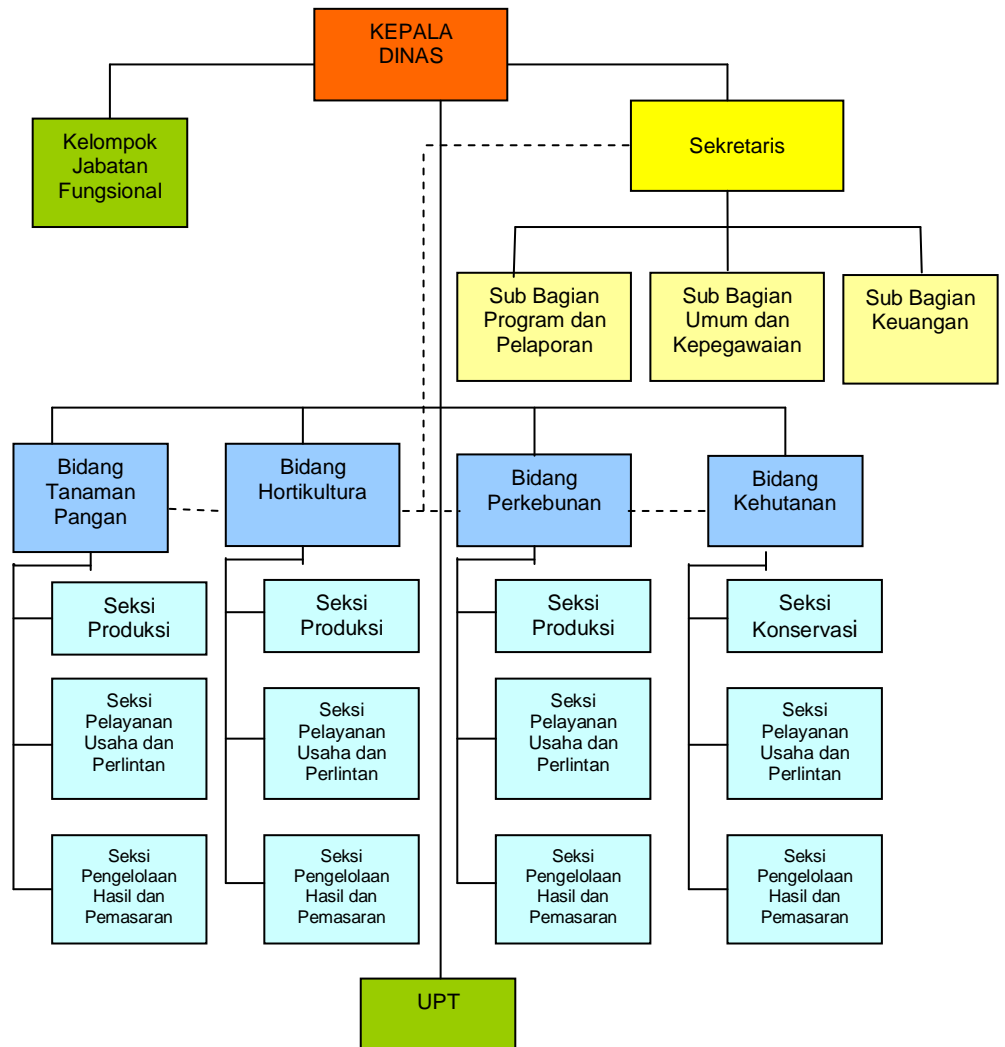
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor merupakan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah di bidang pertanian dan kehutanan yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas membawahi 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang, 3 (tiga) subag, dan 12 seksi. Selain itu terdapat juga 20 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan di kecamatan. Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| a. Kepala Dinas | : Ir. Siti Nuriyanti, MM |
| b. Sekretaris | : Ir. Unzilahir Rohmah |
| 1. KaSubag Program dan Pelaporan | : Ir. A Yeni Haryati |

- 2. KaSubag Umum dan Kepegawaian : R. Suhartono, SP
- 3. KaSubag Keuangan : Indri Wulandari, SP
- c. Kepala Bidang Tanaman Pangan : Ir. Prasetiowati
 - 1. KaSie Produksi : Ir. Irma Villayanti
 - 2. KaSie Pelayanan Usaha dan Perlintah : Ahmad Suwandi, SP
 - 3. KaSie Pengelolaan Hasil & Pemasaran : Ir. Sri Aryantoko, MM
- d. Kepala Bidang Hortikultura : Ir. Isnayati, M.Si
 - 1. KaSie Produksi : Ervinia, S.P, MM
 - 2. KaSie Pelayanan Usaha dan Perlintah : Ir. Heri Firdaus, MM
 - 3. KaSie Pengelolaan Hasil & Pemasaran : Ir. Ida Sriwidaningsih, MM
- e. Kepala Bidang Perkebunan : Ir. Nina Agustina, MM
 - 1. KaSie Produksi : Jayapari, SP
 - 2. KaSie Pelayanan Usaha dan Perlintah : Ir. Chrisnayana Deden, MM
 - 3. KaSie Pengelolaan Hasil & Pemasaran : Ir. Tjahyo Prajitno
- f. Kepala Bidang Kehutanan : Ir. Zahara Hanoum, MM
 - 1. KaSie Konservasi dan Rehabilitasi : Indriyati, S.Hut
 - 2. KaSie Pelayanan Usaha dan Perlintah : Judi Sulaeli, S.Hut, M.Si
 - 3. KaSie Pengelolaan Hasil & Pemasaran : Eko Sri Haryati, SP
- g. Unit Pelaksana Teknis
 - 1. UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil (16 Wilayah)
 - 2. UPT Perbenihan (2 Wilayah)
 - 3. UPT Pengembangan Teknologi Lahan Kering (1 Wilayah)
 - 4. UPT Pengembangan Tanaman Obat (1 Wilayah)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap susunan organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor ditunjukkan oleh Gambar 2.



Keterangan :

- _____ : Garis Instruktif
 - - - - - : Garis Koordinatif

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor (Sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2008)

D. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tanggal 14 Agustus 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018, visi Kabupaten Bogor adalah “ Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan peraturan daerah tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta partisipasi dari para stakeholder, maka visi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor adalah **“Terwujudnya Pertanian dan Kehutanan yang Maju serta Berkelanjutan”**. Visi ini mempunyai makna :

1. Maju; adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing, terampil dan inovatif, baik yang berkenaan dengan pertanian maupun kehutanan, dapat dilihat dari kuantitas, kualitas, kontinuitas, harga produk, pelayanan dan regulasi yang berlaku.
2. Pertanian dan Kehutanan; pertanian adalah suatu kegiatan produksi biologis untuk menghasilkan berbagai kebutuhan manusia, termasuk sandang, pangan dan papan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

3. Berkelanjutan; mengoptimalkan manfaat dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan menyaserasikan sumberdaya alam dan manusia dalam pembangunan, dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia untuk meningkatkan hidupnya di satu sisi dengan pemeliharaan sumberdaya alam dan ekosistemnya di sisi lainnya.

E. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor berdasarkan visi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan, tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari *stakeholder*, yaitu :

1. Meningkatkan produksi, kualitas, dan nilai tambah produk pertanian dan kehutanan;
2. Mengembangkan sentra agribisnis komoditas unggulan; dan
3. Mengoptimalkan kemampuan konservasi sumber daya alam.

F. Tujuan Strategis

Pencapaian tujuan dapat menjadi tolok ukur untuk menilai kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. Tujuan organisasi pada dasarnya untuk jangka panjang yang harus diselesaikan selama jangka waktu tersebut. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Perumusan tujuan

strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 sesuai dengan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
2. Memajukan sentra agribisnis komoditas unggulan;
3. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
4. Meningkatkan pengelolaan usaha kehutanan; dan
5. Menurunkan luasan lahan kritis dan kerusakan hutan.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2016.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Target Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasikan.

Sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, maka Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2016. RKT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tanggal 20 November 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun rincian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2016 ditunjukkan pada Lampiran 1.

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis yang berpengaruh terhadap Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor periode 2013 - 2018 yaitu terkait peningkatan nilai tambah produk pertanian dan kehutanan, pengembangan sentra agribisnis komoditas unggulan, dan konservasi sumber daya alam yang sesuai dengan misi kedua Kabupaten Bogor yaitu Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Usaha Berbasis Sumber Daya Alam dan Pariwisata.

Nilai Tambah (*value added*) memiliki makna yaitu pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan, ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Dalam proses pengolahan nilai tambah dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya, tidak termasuk tenaga kerja. Sedangkan margin adalah selisih antara nilai produk dengan harga bahan bakunya saja. Dalam margin ini tercakup

komponen faktor produksi yang digunakan yaitu tenaga kerja, input produksi lainnya dan balas jasa dalam pengolahan (Hayami et al, 1987).

Berdasarkan pengertian tersebut, perubahan nilai bahan baku yang telah mengalami perlakuan pengolahan besar nilainya dapat diperkirakan. Dengan demikian, atas dasar nilai tambah yang diperoleh, margin dapat dihitung dan selanjutnya imbalan bagi faktor produksi dapat diketahui. Nilai tambah yang semakin besar atas produk pertanian tentunya dapat berperan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang besar tentu saja berdampak bagi peningkatan lapangan usaha dan pendapatan petani yang muara akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan petani.

Pembangunan daerah hingga saat ini telah membuktikan bahwa kebutuhan sumberdaya alam semakin banyak dan senantiasa menghadapi berbagai kendala yang semakin serius, terutama di wilayah pedesaan. Dalam kondisi seperti ini mutlak diperlukan penajaman prioritas pemanfaatan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya wilayah lainnya dengan melibatkan secara penuh segenap potensi masyarakat. Dalam kondisi seperti ini diperlukan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proyek daerah secara cepat, tepat, dan akurat.

Suatu wilayah terbagi menjadi beberapa wilayah pembangunan yang masing-masing mempunyai karakteristik dan potensi wilayah yang berbeda, baik potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, serta infrastruktur fisik dan kelembagaan penunjang pembangunan. Potensi sumberdaya wilayah ini tampaknya masih belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal, terutama karena terbatasnya modal dan teknologi. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain karena masih terbatasnya informasi teknologi dan informasi pasar yang diperlukan untuk mengembangkan wilayah tersebut, serta lemahnya akses masyarakat terhadap peluang-peluang bisnis yang ada.

Suatu bentuk kelembagaan dengan ikatan-ikatan dan hubungan sosial-ekonomi berdasarkan kebutuhan masyarakat diperlukan dalam pengembangan sentra agribisnis komoditas unggulan. Dalam rangka pengembangan sistem agribisnis yang berwawasan agroekosistem, dan mendukung upaya-upaya peningkatan pendapatan petani, maka dipandang perlu untuk dirancang model pengembangan komoditi unggulan wilayah, yang mengacu kepada pendekatan konsep dan terapan sistem manajemen usaha tani di pedesaan.

Konservasi sumber daya alam merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilai. Adapun tujuan konservasi menurut undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

1.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya beberapa target IKU yang telah ditetapkan, yaitu produksi sayuran, produksi tanaman perkebunan, kontribusi sector pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku, kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga konstan, kontribusi sector pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku, kontribusi sector pertanian (palawija/tanaman bahan makanan terhadap PDRB harga konstan, kontribusi sector perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB berlaku, kontribusi sector perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB konstan, cakupan usaha kayu rakyat, cakupan usaha bamboo, kontribusi sector kehutanan terhadap PDRB harga konstan, kontribusi sector kehutanan terhadap PDRB harga berlaku, cakupan legalitas usaha kehutanan;

2. Pengetahuan kelompok tentang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang masih rendah sehingga pemeliharaan pertanaman kurang optimal;
3. Adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) berupa serangan WBC);
4. Adanya pengaruh pasar global dalam komoditas industri karet dan pala, sehingga berdampak pada perkembangan usaha tani lokal;
5. Para petani masih ragu menggunakan power thresher karena usaha taninya masih sistem ceblokan dan memerlukan biaya lagi untuk pembelian bahan bakar dalam pengoperasionalnya;
6. Penerapan teknologi dengan konfigurasi Husker-Separator-Polisher belum banyak dilaksanakan di tingkat petani;
7. Penanganan pasca panen yang masih kurang baik yaitu masih banyaknya kotoran sehingga rendemen yang dihasilkan masih rendah;
8. Kebiasaan petani dalam melakukan kegiatan pengolahan hasil padi secara tradisional menyulitkan dalam penerapan teknologi yang baik dan benar;
9. Masih banyaknya penggilingan padi yang sudah melebihi umur ekonomis;
10. Pola pikir beberapa petani bahwa bantuan dari Pemerintah tidak perlu dipertanggungjawabkan hasilnya atau tidak perlu dikembalikan, sehingga menjadi salah satu faktor dari pengembalian gabah yang tidak mencapai target;
11. Anggaran yang masih terbatas sehingga alat-alat pengolahan padi yang diberikan kepada kelompok tani belum semua kelompok pelaksana kegiatan diberikan lengkap;
12. *System of Rice Intensification (SRI)*/Ditjen PSP masih ada kelompok tani pelaksana kegiatan yang masih belum memahami metode Pengembangan SRI sehingga pelaksanaan kegiatan belum

sepenuhnya menggunakan konsep-konsep SRI, beberapa kelompok tani masih ragu ragu dengan penerapan SRI karena ada kekhawatiran metode ini dapat menyebabkan penurunan produksi;

13. Dalam hal pemasaran kelompok masih mengandalkan pasar lokal dan pedagang pengumpul sehingga tingkat kepastian usaha dan jaminan pasar masih rendah;
14. Keterbatasan modal & pengetahuan petani karet membuat produksi Sheet yang dihasilkan kurang sesuai dengan yang diharapkan (RSS1) sehingga petani mendapatkan harga yang rendah;
15. Penyadapan untuk memperoleh getah karet sebagai bahan baku lump dilakukan tidak mengikuti teknis yang dianjurkan;
16. Petani kopi di Kabupaten Bogor belum menerapkan teknik pasca panen kopi yang sesuai dengan yang dianjurkan seperti pada waktu panen harus dipetik pilih, yang dilakukan oleh petani adalah memanen tanpa petik pilih. Penjemuran biji kopi tanpa menggunakan alas;
17. Masih banyak petani kopi menjual hasilnya dalam bentuk gelondong tanpa memprosesnya lebih lanjut sampai dalam bentuk bubuk kopi;
18. Belum semua petani memahami tentang cara pengendalian OPT dengan benar dan sesuai aturan;
19. Belum semua pelaku usaha perbenihan atau penangkar benih mengetahui dan memahami peraturan tentang perbenihan;
20. Pelaku usaha perbenihan atau penangkar benih banyak yang belum mendaftarkan usahanya ke Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor;
21. Pengelola kebun kurang memiliki administrasi pengelolaan kebun yang ada di kantor kebun, lebih banyak administrasi kebun berada di kantor pusat;

22. Kelompok tani belum memahami sepenuhnya mengenai teknologi budidaya, dan pemeliharaan tanaman perkebunan;
23. Modal usaha tani masih rendah, sehingga ketergantungan terhadap bantuan pemerintah masih tinggi;
24. Tanaman perkebunan waktu produksinya lama dan bibit unggul tanaman perkebunan harganya relatif mahal serta sulit diperoleh, menyebabkan banyak petani yang membudidayakan tanaman perkebunan dengan bibit asalan sehingga produksi & produktivitasnya rendah;
25. Masih rendahnya kualitas SDM petani menyebabkan kemampuan aplikasi petani terhadap teknologi rendah, akibatnya dinamika kelompok juga rendah;
26. Ada tahapan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas terutama mekanisme pasar;

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu :

1. Koordinasi berkelanjutan/intensif dengan instansi terkait di tingkat Provinsi maupun Pusat dalam pelaksanaan Kegiatan;
2. Pengawasan dan pembinaan yang intensif dari para petugas, baik dari tingkat kabupaten, UPT dalam pelaksanaan SLPTT;
3. Mensosialisasikan terus akan pentingnya alat pasca panen dalam penanganan pasca panen yang baik sehingga para petani mau beralih melaksanakan pemanenan dengan menggunakan mesin;
4. Dilaksanakannya sosialisasi dan bimbingan teknis berkaitan dengan manajemen pengolahan padi yang benar secara terus menerus agar petani lebih mengerti;
5. Pendampingan dilaksanakan oleh pihak penyedia dan teknisi kepada kelompok sampai alat dapat beroperasi optimal;
6. Diharapkan untuk kegiatan yang akan datang sudah ada perjanjian dengan Kelompok Tani yang menerima kegiatan GP3M perihal

pengembalian gabah kering giling yang tidak sesuai dengan target, pengecualian bila dalam keadaan serangan hama atau musibah;

7. Kekurangan alat-alat pengolahan padi supaya diajukan melalui proposal untuk dijadikan dasar dalam pengajuan anggaran baik anggaran APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN;
8. Pengawasan dan pembinaan yang intensif dari para petugas baik tingkat kabupaten, kecamatan, PPL, maupun POPT;
9. Pembinaan lebih lanjut dari petugas Pengamat OPT (POPT) setempat dan dicalonkannya kelompok menjadi peserta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) komoditas hortikultura;
10. Memfasilitasi kelompok tani dengan pasar tanaman hias dan pelaku usaha yang menggunakan komoditas hortikultura sebagai bahan bakunya;
11. Keterbatasan Modal dapat diatasi dengan pemberian pinjaman lunak yang ada dibank pemerintah seperti Bank Jabar atau Bank Rakyat Indonesia;
12. Perlu banyaknya forum bimbingan teknis bagi petani karet dengan narasumber yang berkompeten dalam masalah karet;
13. Diperlukan bimbingan yang terus menerus untuk merubah kebiasaan petani sehingga dapat melakukan pasca panen apa yang sesuai dengan teknik yang dianjurkan;
14. Diperlukan fasilitasi bagi petani untuk dapat mengolah kopi sampai pada bubuk kopi;
15. Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha perbenihan/penangkar benih atas ketentuan perundang-undangan tentang perbenihan;
16. Melaksanakan pembinaan agar penangkar benih melakukan pendaftaran usaha ke Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor;

17. Diminta kepada pihak administrasi/kepala kebun untuk memiliki fotocopy arsip yang ada di kantor pusat, untuk memudahkan dalam pembinaan selanjutnya;
18. Diminta kepada Administratur/Kepala Kebun untuk membuat semua administrasi pengelolaan teknis perkebunan setiap tahapan budidaya tanaman;
19. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang beberapa program yang diluncurkan pemerintah untuk penguatan modal usaha petani, misalnya program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan), KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi), LM3 (Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat), dan PMD (Penggerak Membangun Desa). Bekerjasama dengan pelaku pasar;
20. Memberikan bimbingan teknis budidaya tanaman perkebunan terus menerus secara berkelanjutan sehingga terjadi alih teknologi dari kelompok-kelompok yang telah berhasil;
21. Pengadaan bibit unggul, pemilihan blok-blok penghasil tinggi tanaman perkebunan sebagai sumber benih, pembibitan di sentra-sentra/potensi perkebunan sehingga bibit unggul dapat dengan mudah diperoleh, pengadaan kebun entres karet varietas anjuran di sentra/potensi, serta inovasi penggunaan bibit pala grafting cepat produksi;
22. Intensifikasi, rehabilitasi dan optimalisasi lahan, rejuvinasi pada kebun-kebun kopi yang sudah tua

1.4 PRESTASI DAN KEBERHASILAN

Prestasi yang diraih oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selama tahun 2016, sebagai berikut :

1. The Best Robusta at specialty Coffee Contest (KCSI) 8th di Acara Festival Tanah Gayo, Takengon, Aceh Tengah, Indonesia;
2. Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Ali Sungkowo sebagai Petani/Keltan Berprestasi Kategori Kelembagaan

Komoditi Kopi dalam rangka Memperingati Hari Bhakti Perkebunan Tk. Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;

3. Penghargaan Stand Terbaik 5 pada Agro and Food Wxpo 2016 dari Kementerian Pertanian;
4. Penghargaan Juara I Lomba Mobil Hias pada Bogor Fruit Indonesia Carnival 2016;
5. Penghargaan sebagai Pelopor Pendukung Pengembangan Kopi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 kepada Bupati Bogor dari Gubernur Jawa Barat.

Sedangkan keberhasilan yang dicapai pada tahun 2016 yaitu :

1. Produksi Padi 103,81 %, hal ini akibat adanya kegiatan Upaya Khusus (UPSUS) PAJALE yang bersumber dari dana APBN maupun kegiatan Pengelolaan Tanaman Terpadu dari APBD.
2. Produksi Buah-buahan 194,22 %, hal ini akibat adanya bantuan sarana prasarana, peningkatan teknologi budidaya, dan kegiatan pengembangan kawasan tanaman florikultura yang bersumber dari dana APBN maupun APBD.
3. Produksi tanaman hias bunga (tangkai) 117,87 %, hal ini akibat adanya bantuan sarana prasarana, peningkatan teknologi budidaya, dan kegiatan pengembangan kawasan tanaman florikultura yang bersumber dari dana APBN maupun APBD.
4. Produksi tanaman hias daun indah (pohon) 159,82 %, hal ini akibat adanya bantuan sarana prasarana, peningkatan teknologi budidaya, dan kegiatan pengembangan kawasan tanaman florikultura yang bersumber dari dana APBN maupun APBD.
5. Produksi tanaman obat 132,78 %, hal ini akibat adanya kegiatan Pengembangan tanaman obat dari dana APBD.
6. Kontribusi produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku 159,17 %.
7. Kontribusi produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku 133,21 %.

8. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat 126,10 %, hal ini akibat adanya dukungan kegiatan yang bersumber dari dana APBD berupa penyebaran benih label ungu maupun dari APBN melalui adanya Kegiatan Desa Mandiri Benih. Selain itu, adanya dukungan swadaya masyarakat yang menyediakan sarana prasarana selain benih.
9. Persentase swasembada benih padi unggul bersertifikat 126,12%.
10. Produktivitas padi sawah 104,38 %, hal ini akibat adanya penggunaan benih bersertifikat, rendahnya serangan OPT, dan perbaikan pola budidaya menggunakan sistem jajar legowo.
11. Produktivitas sayuran 103,33 %, hal ini akibat adanya penggunaan benih bersertifikat, rendahnya serangan OPT, dan perbaikan pola budidaya.
12. Jumlah komoditas unggulan 116,67 %, hal ini akibat adanya pengembangan sentra komoditas unggulan dan sentra agribisnis.
13. Jumlah lokasi sentra agribisnis 150,00 %, hal ini akibat adanya pengembangan lokasi sentra agribisnis komoditas unggulan.
14. Persentase peningkatan nilai tambah dari padi menjadi beras 158,22 %.
15. Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung 293,35 %.
16. Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung 187,02 %.
17. Persentase peningkatan nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri 157,89 %.
18. Persentase peningkatan nilai tambah dari karet mentah menjadi sheet kering 124,99 %.
19. Persentase peningkatan nilai tambah dari kopi gelondongan basah menjadi berasan 181,82 %.
20. Rehabilitasi hutan dan lahan 143,68 %, hal ini akibat adanya penghijauan melalui gerakan penanaman berupa fasilitasi bantuan bibit tanaman kayu-kayuan dan MPTS serta pupuk maupun pestisida.
21. Kerusakan kawasan hutan 199,00 %, hal ini akibat adanya penghijauan melalui gerakan konservasi hutan.

22. Cakupan Usaha Non Kayu untuk komoditas jamur kayu 135,14 % dan Lebah madu 111,11 %.

1.5 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2016 mengacu kepada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tanggal 20 November 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tanggal 14 Agustus 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2016 ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selama kurun waktu Tahun 2016 dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi "***Terwujudnya Pertanian dan Kehutanan yang Maju serta Berkelanjutan***", yang selanjutnya dituangkan ke dalam 3 (tiga) misi yaitu 1). Meningkatkan produksi, kualitas, dan nilai tambah produk pertanian dan kehutanan, 2). Mengembangkan sentra agribisnis komoditas unggulan, dan 3). Mengoptimalkan kemampuan konservasi sumber daya alam. Upaya pencapaian sasaran, dalam penerapannya didukung oleh anggaran APBD Kabupaten Bogor dan dituangkan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan.

Penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dialokasikan untuk Belanja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tahun 2016 dengan target sebesar Rp. 44.785.304.000,- terealisasi sebesar Rp. 42.201.811.490,- atau terserap 94,23%. Secara garis besar realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tahun 2016 untuk Belanja Tidak Langsung dari target Rp. 13.134.242.000,- yang dapat terealisasi sebesar Rp. 12.947.413.713,- (98.58%), sedangkan Belanja Langsung dari target Rp. 31.651.062.000,- yang dapat terealisasi sebesar Rp. 29.254.397.777,- (92,43%). Dana yang tidak terserap disebabkan oleh adanya efisiensi

penggunaan biaya, selisih penawaran harga, dan terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Anggaran belanja langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tahun 2016 yang terdiri dari 12 Program dan 110 Kegiatan. Ringkasan mengenai program, kegiatan, dan anggaran pada perjanjian kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2016 serta realisasinya ditunjukkan oleh Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Realisasi Belanja Langsung

No	Program	Jumlah Keg.	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	
					Keu (%)	Fisik (%)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	1,867,158,000	1,691,315,909	90.58	100.00
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7	2,485,130,000	2,320,326,014	93.37	100.00
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	106,700,000	97,660,000	91.53	100.00
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	107,750,000	106,650,000	98.98	100.00
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9	950,650,000	928,415,496	97.66	100.00
6.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	7	3,565,670,000	3,424,173,151	96.03	100.00
7.	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	11	3,803,386,000	3,639,991,739	95.70	100.00

No	Program	Jumlah Keg.	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	
					Keu (%)	Fisik (%)
8.	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	42	14,558,632,000	13,172,320,119	90.48	100.00
9.	Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan	5	1,784,988,000	1,655,310,650	92.74	100.00
10.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	5	1,100,039,000	1,049,583,480	95.41	100.00
11.	Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	2	497,039,000	431,087,527	86.73	100.00
12.	Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	4	823,930,000	737,563,692	89.52	100.00
TOTAL		110	31,651,062,000	29,254,397,777	92.43	100.00

Ringkasan mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, dan target pada perjanjian kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Misi-1 :

Meningkatkan produksi, kualitas, dan nilai tambah produk pertanian dan kehutanan, yaitu :

No	Sasaran Strategis /Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan :		
	1. Padi	Ton GKG	565,002
	2. Sayuran	Ton	92,027
	3. Buah – Buahan	Ton	59,674
	4. Tanaman Hias Bunga	Tangkai	4,109,689

No	Sasaran Strategis /Indikator Kinerja	Satuan	Target
	5. Tanaman Hias Daun Indah	Pohon	407,307
	6. Tanaman Obat	Ton	4,365
	7. Tanaman Perkebunan	Ton	35,586
2.	Tercapainya Swasembada Benih Padi Unggul Bersertifikat	Ton	525
3.	Persentase Swasembada Benih Padi Unggul Bersertifikat	%	46.45
4.	Produktivitas Padi dan Pangan Utama lainnya :		
	1. Produktivitas Padi Sawah	Ku/Ha	61.61
	2. Produktivitas Padi Gogo	Ku/Ha	34.77
	3. Produktivitas Palawija	Ku/Ha	170.09
5.	Persentase Peningkatan Nilai Tambah dari Padi menjadi Beras	%	0.80
6.	Persentase Peningkatan Nilai Tambah dari Ubi Kayu menjadi Tepung	%	2.00
7.	Persentase Peningkatan Nilai Tambah dari Ubi Jalar menjadi Tepung	%	3.00
8.	Persentase Peningkatan Nilai Tambah dari Pala menjadi Minyak Atsiri	%	10.00
9.	Persentase Peningkatan Nilai Tambah dari Karet Mentah menjadi Sheet Kering	%	5.00
10.	Persentase Peningkatan Nilai Tambah dari Kopi Gelondongan Basah menjadi Berasan	%	5.00
11.	Cakupan Usaha Kayu Rakyat	%	42.00
12.	Cakupan Usaha Non Kayu :		
	1. Usaha Jamur Kayu	%	18.00
	2. Lebah Madu	%	15.00
	3. Bambu	%	12.00

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Satuan	Target
13.	Cakupan Legalitas Usaha Kehutanan	%	15.00

Misi-2 :

Mengembangkan sentra agribisnis komoditas unggulan, yaitu :

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Sentra Agribisnis Komoditas Unggulan :		
	- Jumlah Komoditas Unggulan	Komoditas	12

Misi-3 :

Mengoptimalkan kemampuan konservasi sumber daya alam, yaitu :

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	6,57
2.	Kerusakan Kawasan Hutan	%	10,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2016

Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tanggal 20 November 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun rincian Penetapan Kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tahun 2015 ditunjukkan pada Lampiran 2, sedangkan Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tahun 2016 disajikan dalam Lampiran 3.

Dalam mengukur capaian kinerja disusunlah indikator kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tahun 2016 dengan ketentuan untuk mengukur indikator kinerja melalui rumus perhitungan persentase (%) capaian target indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**Progress Positif**), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (**Progress Negatif**), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel 2 dan Tabel 3 berikut :

Tabel 2. Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	< 55	Kurang

Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

Tabel 3. Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Kurang
2	85 s/d 100	Cukup
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Baik Sekali
5	< 55	Sangat Baik

Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor Tahun 2015 dan 2016

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan Produksi Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan :							
	a. Produksi Padi	Ton GKG	553.924	497.043	89,73	565.002	586.547	103,81
	b. Produksi Sayuran	Ton	90.222	71.331	79,06	92.027	84.936	92,29
	c. Produksi Buah - Buah	Ton	57.936	53.627	92,56	59.674	115.896	194,22
	d. Produksi Tanaman Hias Bunga	Tangkai	3.989.990	5.264.987	131,95	4.109.689	4.843.949	117,87
	e. Produksi Tanaman Hias Daun Indah	Pohon	395.444	468.699	118,52	407.307	650.953	159,82
	f. Produksi Tanaman Obat	Ton	4.279	4.214	98,48	4.365	5.796	132,78
g. Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	34.217	36.119,40	105,56	35.586	32.241	90,60	
2.	Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku	%	3,92	3,81	97,32	3,87	3,82	98,71
3.	Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga konstan	%	4,54	4,31	95,02	4,54	3,57	78,63
4.	Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku	%	2,42	1,99	82,20	2,40	1,46	60,83
5.	Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan	%	2,68	2,08	77,50	2,68	1,23	45,90

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.	Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB berlaku	%	0,40	0,26	65,00	0,39	0,22	56,41
7.	Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB konstan	%	0,46	0,35	76,09	0,46	0,26	56,52
8.	Kontribusi produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku	%	2,42	3,73	154,13	2,40	3,82	159,17
9.	Kontribusi produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan	%	2,68	4,31	160,82	2,68	3,57	133,21
10.	Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat	Ton	225	247,5	110,00	525	662	126,10
11.	Persentase swasembada benih padi unggul bersertifikat	%	19,91	20,94	105,17	46,45	58,58	126,11
12.	Produktivitas padi dan pangan utama lainnya :							
	a. Produktivitas padi sawah	Ku/Ha	61,30	63,66	103,85	61,61	64,31	104,38
	b. Produktivitas padi gogo	Ku/Ha	34,60	32,69	94,48	34,77	32,93	94,71
	c. Produktivitas palawija	Ku/Ha	169,24	175,20	103,52	170,09	164,32	96,61
d. Produktivitas sayuran	Ku/Ha	107,76	111,06	103,06				
13.	Sentra agribisnis komoditas unggulan :							
	a. Jumlah komoditas unggulan	Komoditas	11	14	127,27	12	14	116,67
	b. Jumlah lokasi sentra agribisnis	Lokasi	-	-	-			
14.	NTP	%	107,84	101,17	93,81	111,80	101,32	91,21
15.	Persentase peningkatan nilai tambah dari padi menjadi beras	%	0,80	0,80	100,00	0,80	1,27	158,75
16.	Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung	%	2	2	100,00	2,00	5,87	293,50
17.	Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung	%	3	3	100,00	3,00	5,61	187,00
18.	Persentase peningkatan nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri	%	10	0,25	2,50	10,00	15,79	157,90
19.	Persentase peningkatan nilai tambah dari karet mentah menjadi sheet kering	%	5	1	20,00	5,00	6,25	125,00
20.	Persentase peningkatan nilai tambah dari kopi gelondongan basah menjadi berasan	%	5	5	100,00	5,00	9,09	181,80
21.	Cakupan usaha kayu rakyat	%	28	28	100,00	42,00	40,00	64,71
22.	Cakupan usaha non kayu :							
	a. Usaha jamur kayu	%	15	15	100,00	18,00	24,00	133,33
	b. Usaha lebah madu	%	10	10	100,00	15,00	17,00	113,33
c. Usaha bambu	%	8	8	100,00	12,00	10,00	83,33	
23.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan	%	0,013	0,012	94,81	0,013	0,010	76,92
24.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	%	0,014	0,012	88,03	0,014	0,010	71,43
25.	Cakupan legalitas usaha kehutanan	%	9,00	9,00	100,00	15,00	12,00	80,00
26.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	6,57	6,69	101,83	6,57	9,44	143,68
27.	Kerusakan kawasan hutan	%	10	10	100,00	10,00	0,10	199,00
RATA-RATA								120,99

Evaluasi dan analisis masing-masing pencapaian sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran pertama **“Tercapainya peningkatan produksi tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat, dan tanaman perkebunan”** untuk mewujudkan misi pertama **“Meningkatkan produksi, kualitas, dan nilai tambah produk pertanian dan kehutanan”** diperoleh melalui penjabaran indikator sasaran sebanyak 12 (dua belas) indikator sasaran, antara lain :

- 1) Peningkatan Produksi Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan :
 - a. Produksi padi tahun 2016 dari target sebesar 565,002 ton GKG, terealisasi sebesar 586,547 ton GKG, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 103.81%. Kondisi tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 89.73 % naik sebesar 14.08%. Hal ini disebabkan karena adanya program UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Padi Jagung dan Kedele) yang ditetapkan Kementerian Pertanian serta program LTT (luas tambah tanam) padi yang berdampak positif pada meningkatnya gerakan tanam padi untuk mencapai target produksi padi. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, produksi padi ditahun 2016 tercapai 586,547 ton GKG dari target sebesar 565,002 ton GKG atau tercapai sebesar 103.81%.
 - b. Produksi sayuran tahun 2016 dari target sebesar 92,027 ton, terealisasi sebesar 84,936 ton, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 92.29%. Kondisi tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 79.06 % naik sebesar 13.23 % menjadi 92.29% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena adanya bantuan APBN Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Dirjen Hortikultura dimana Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan alokasi untuk penanaman cabai seluas 30 hektar di Kecamatan

Cisarua dan Megamendung. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, produksi sayuran ditahun 2015 telah tercapai 71,331 ton dari target sebesar 95,745 ton atau tercapai sebesar 74.50 %.

- c. Produksi buah-buahan tahun 2016 dari target sebesar 59,674 ton, terealisasi sebesar 115,896 ton, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 194.22%. Kondisi tersebut mengalami peningkatan yang apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 92.56% naik sebesar 101.56 % menjadi 194.22 % pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena adanya bantuan Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura melalui kegiatan pengembangan kawasan buah seluas 25 Ha di daerah Cigudeg dan Jasinga. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, produksi buah-buahan ditahun 2016 tercapai 115,896 ton dari target sebesar 60,572 ton atau telah tercapai sebesar 191,34%.
- d. Produksi tanaman hias bunga tahun 2016 dari target sebesar 4,109,689 tangkai, terealisasi sebesar 4,843,948 tangkai, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 117.87%. Kondisi tersebut bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2016 mengalami penurunan, dimana capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 131.95% turun sebesar 14.08% dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan karena aplikasi paket teknologi maupun metode budidayanya belum dilakukan secara optimal dibandingkan dengan Tahun 2015. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini produksi tanaman hias bunga di tahun 2016 telah tercapai 4,843,948 tangkai dari target sebesar 4,192,294 tangkai atau telah tercapai sebesar 115.54 %.
- e. Produksi tanaman hias daun indah tahun 2016 dari target sebesar 407,307 pohon, terealisasi sebesar 650,953 pohon, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 159.82 %. Kondisi tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015,

dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 118.52 % naik sebesar 41.30 % pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena meningkatnya permintaan pasar terhadap tanaman hias serta meningkatnya keinginan kelompok tani dalam berusaha tanaman hias. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini produksi tanaman hias daun indah ditahun 2016 tercapai 650,953 pohon dari target sebesar 415,494 pohon atau tercapai sebesar 156.67 %.

- f. Produksi tanaman obat tahun 2016 dari target sebesar 4,465 ton, terealisasi sebesar 5,796 ton, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 132.78%. Kondisi tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 98.48 % naik sebesar 34.30 % pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura untuk pengembangan kawasan tanaman obat seluas 10 Ha di Kecamatan Nanggung. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini produksi tanaman obat ditahun 2016 tercapai 5,796 ton dari target sebesar 4,453 ton atau telah tercapai sebesar 130.16 %.
- g. Produksi tanaman perkebunan tahun 2016 dari target sebesar 35,586 ton, terealisasi sebesar 32,241 ton, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 90.60%. Kondisi tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 105.58 % turun sebesar 14.98% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena sulitnya memperoleh bibit tanaman perkebunan yang unggul dan bersertifikat sehingga terjadi penurunan produksi maupun produktivitas perkebunan. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini produksi tanaman perkebunan ditahun 2016 telah tercapai 32,241 ton dari target sebesar 38,860 ton atau telah tercapai sebesar 82.96 %.

- 2) Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku tahun 2016 dari target sebesar 3.87 %, terealisasi sebesar 3.82 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 98.71%. Kondisi tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 97.19 %, naik sebesar 1.52 % menjadi 98.71 % pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku ditahun 2016 tercapai 3.82 % dari target sebesar 3.82 % atau telah tercapai sebesar 100 %.
- 3) Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga konstan tahun 2016 dari target sebesar 4.54 %, terealisasi sebesar 3.57 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 78.63 %. Kondisi tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 94.93 %, turun sebesar 16.30 % menjadi 78.63 % pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga konstan ditahun 2016 telah tercapai 3.57 % dari target sebesar 4,54 % atau telah tercapai sebesar 78.63 %.
- 4) Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku tahun 2016 dari target sebesar 2.40 %, terealisasi sebesar 1.46 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 60.83%. Capaian kinerja tahun 2015 lebih tinggi sebesar 1.99% apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku ditahun 2016 baru tercapai 1.46 % dari target sebesar 2.36 % atau telah tercapai sebesar 61.86 %.
- 5) Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan tahun 2016 dari target sebesar 2.68 %, terealisasi sebesar 1.23 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 45.90%.

Capaian kinerja tahun 2015 sebesar 2.08% lebih besar apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan ditahun 2016 telah tercapai 1.23 % dari target sebesar 2.68 % atau baru tercapai sebesar 45.89 %.

- 6) Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB berlaku tahun 2016 dari target sebesar 0.39 %, terealisasi sebesar 0.22 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 56.41%. Capaian kinerja tahun 2015 lebih tinggi sebesar 0.26 % apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB berlaku ditahun 2016 telah tercapai 0.22 % dari target sebesar 0.37 % atau baru tercapai sebesar 59.45 %.
- 7) Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB konstan tahun 2016 dari target sebesar 0.46%, terealisasi sebesar 0.26 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 56.52 %. Capaian kinerja tahun 2015 lebih tinggi sebesar 0.35 % apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB konstan ditahun 2016 tercapai 0.26 % dari target sebesar 0.46 % atau telah tercapai sebesar 56.52 %.
- 8) Kontribusi produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku tahun 2016 dari target sebesar 2.40 %, terealisasi sebesar 3.82 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 159.17 %. Capaian kinerja tahun 2016 lebih tinggi sebesar 3.82 % apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 3.73%. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini kontribusi produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan)

terhadap PDRB harga berlaku ditahun 2016 telah tercapai 3.82 % dari target sebesar 2.36 % atau telah tercapai sebesar 161.86 %.

- 9) Kontribusi produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan tahun 2016 dari target sebesar 2.68 %, terealisasi sebesar 3.57 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 133.21 %. Capaian kinerja tahun 2015 lebih tinggi sebesar 160.82 % apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini kontribusi produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan ditahun 2016 telah tercapai 3.57 % dari target sebesar 2.68 % atau telah tercapai sebesar 133.21 %.
- 10) Swasembada benih padi unggul bersertifikat tahun 2016 dari target sebesar 525 ton, terealisasi sebesar 662 ton, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 126.10 %. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini swasembada benih padi unggul bersertifikat ditahun 2016 telah tercapai 662 ton dari target sebesar 1,134 ton atau telah tercapai sebesar 58.37 %. Pencapaian ini antara lain dipengaruhi oleh dukungan kegiatan Pengembangan Penangkar Benih Padi seluas 60 ha di Kecamatan Tanjungsari dan Cariu, kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan seluas 30 ha di Kecamatan Jonggol dan Tanjungsari, kegiatan Pengadaan Alat Pasca Panen Padi sebanyak 3 jenis alat dan 244 unit di Kecamatan Jonggol, Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Pamijahan, Leuwiliang dan Caringin, serta produksi benih yang dihasilkan secara swadaya oleh kelompok tani.
- 11) Persentase swasembada benih padi unggul bersertifikat tahun 2016 dari target sebesar 46.45 %, terealisasi sebesar 58.58 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 126.11 %. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini persentase swasembada benih padi unggul bersertifikat ditahun 2016 telah tercapai 58.58 % dari target sebesar 100.32 % atau telah tercapai sebesar 58.39 %.

12) Produktivitas padi dan pangan utama lainnya :

- a. Produktivitas padi sawah pada tahun 2016, dari target sebesar 61.61 ku/ha, terealisasi sebesar 64.31 ku/ha sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 104.38 %. Kondisi tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 63.66 %, naik sebesar 0.65 % menjadi 64.31 % pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan program Upsus Pajale dan Gerakan Tanam yang berakibat pada pencapaian produksi dan produktivitas. Adapun kegiatan yang mendukung capaian kinerja tersebut adalah kegiatan Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Padi seluas 15 ha, Pengembangan Penangkar Benih Padi seluas 60 ha di Kecamatan Tanjungsari dan Cariu, kegiatan Pengadaan Alat Pasca Panen Padi di Kecamatan Jonggol, Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Pamijahan, Leuwiliang dan Caringin, kegiatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Padi, kegiatan Pengembangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi seluas 150 ha. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini produktivitas padi sawah ditahun 2016 telah tercapai 64.31 ku/ha dari target sebesar 63.25 ku/ha atau telah tercapai sebesar 102.00 %.
- b. Produktivitas padi gogo pada tahun 2016, dari target sebesar 34.77 ku/ha, terealisasi sebesar 32.93 ku/ha sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 94.71 %. Kondisi tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 94.48 %, naik sebesar 0.23 % menjadi 94.71 % pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan program Upsus Pajale dan Gerakan Tanam yang berakibat pada pencapaian produksi dan produktivitas. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini

produktivitas padi gogo ditahun 2016 telah tercapai 32.93 ku/ha dari target sebesar 33.61 ku/ha atau telah tercapai sebesar 97.97 %.

- c. Produktivitas palawija pada tahun 2016, dari target sebesar 170.09 ku/ha, terealisasi sebesar 164.32 ku/ha sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 96.61 %. Kondisi tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 103.52 %, turun sebesar 6.91 % menjadi 96.61 % pada tahun 2016. Penurunan capaian kinerja tahun 2016 ini disebabkan karena belum optimalnya penerapan teknologi budidaya tanaman palawija. Adapun kegiatan yang mendukung capaian kinerja tersebut adalah kegiatan Pemanfaatan Teknologi Lahan Kering di Kecamatan Tenjo dan kegiatan Intensifikasi Tanaman Talas seluas 15 ha di Kecamatan Cijeruk, Cigombong dan Tamansari. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini produktivitas palawija ditahun 2016 telah tercapai 164.32 ku/ha dari target sebesar 171.79 ku/ha atau telah tercapai sebesar 95.65 %.
- d. Produktivitas sayuran pada tahun 2016, dari target sebesar 108.30 ku/ha, terealisasi sebesar 111.91 ku/ha sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 103.33 %. Pencapaian indikator sasaran tahun 2016 ini disebabkan karena adanya penerapan paket teknologi pada sarana produksi berupa pupuk dan benih unggul bersertifikat yang tepat guna dan tepat sasaran, alsintan, maupun perbaikan jaringan irigasi, serta penerapan metode budidaya yang baik. Adapun kegiatan yang mendukung capaian kinerja tersebut adalah kegiatan Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura di Kecamatan Klapanunggal, Megamendung, Jasinga dan kegiatan Pengembangan Sayuran seluas 10 ha tanaman cabe di Kecamatan Ciawi dan Megamendung. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini produktivitas sayuran ditahun 2016 telah

tercapai 111.91 ku/ha dari target sebesar 109.38 ku/ha atau telah tercapai sebesar 97.73 %.

Dalam mewujudkan sasaran kedua "**Terwujudnya sentra agribisnis komoditas unggulan**" untuk mewujudkan misi kedua "**Mengembangkan sentra agribisnis komoditas unggulan**" diperoleh melalui penjabaran indikator sasaran sebanyak 1 (satu) indikator sasaran, yaitu :

- 1) Sentra agribisnis komoditas unggulan :
 - a. Jumlah komoditas unggulan tahun 2016 dari target sebesar 12 komoditas, terealisasi sebesar 14 komoditas, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 116.67 %. Kondisi tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 127.27 %, turun sebesar 10.60 % menjadi 116.67 % pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini jumlah komoditas unggulan ditahun 2016 telah tercapai 14 komoditas dari target sebesar 12 komoditas atau telah tercapai sebesar 116.67 %. Pencapaian ini didukung dengan adanya kegiatan Pengembangan Pemasaran Produk Pertanian/Kehutanan melalui temu teknis sebanyak 4 kali, kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Daerah melalui penyelenggaraan pameran sebanyak 4 kali pameran, kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kebun Koleksi melalui pembangunan pagar kebun koleksi, kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Produk Tanaman Hortikultura melalui temu teknis dan analisa usaha tani, kegiatan Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura melalui pengadaan alat pasca panen hortikultura sebanyak 253 unit, kegiatan Pembuatan Rumah Penampungan Hasil dan Pengolahan Hortikultura sebanyak 1 unit, serta kegiatan DED Sarana Prasarana Pendukung Kebun Koleksi sebanyak 1 dokumen DED.
 - b. Indikator lokasi komoditas unggulan tahun 2016 dari target sebesar 2 lokasi sentra agribisnis terealisasi sebesar 3 lokasi, sehingga

pencapaian kerjanya sebesar 150.00 %. Kondisi capaian kinerja tahun 2016 ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015, dikarenakan belum adanya target kerjanya. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini jumlah komoditas unggulan ditahun 2016 telah tercapai 3 lokasi sentra agribisnis dari target sebesar 4 lokasi atau telah tercapai sebesar 75%. Adapun yang telah ditetapkan menjadi sentra agribisnis adalah Kecamatan Rancabungur sebagai sentra buah pepaya california, Kecamatan Tamansari sebagai sentra tanaman hias, serta Kecamatan Gunung Sindur.

Dalam mewujudkan sasaran ketiga "**Terwujudnya nilai tambah hortikultura dan perkebunan**" untuk mewujudkan misi kesatu "**Meningkatkan produksi, kualitas, dan nilai tambah produk pertanian dan kehutanan**" diperoleh melalui penjabaran indikator sasaran sebanyak 7 (tujuh) indikator sasaran, antara lain :

- 1) NTP tahun 2016 dari target sebesar 111.08 %, terealisasi sebesar 101.32 %, sehingga pencapaian kerjanya sebesar 91.21 %. Kondisi tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 93.81 %, turun sebesar 2.60 % menjadi 91.21 % pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini NTP ditahun 2016 telah tercapai 101.32 % dari target sebesar 117.56 % atau telah tercapai sebesar 86.18 %.
- 2) Persentase peningkatan nilai tambah dari padi menjadi beras tahun 2016 dari target sebesar 0,80 %, terealisasi sebesar 1.27 %, sehingga pencapaian kerjanya sebesar 158.75 %. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini persentase peningkatan nilai tambah dari padi menjadi beras ditahun 2016 telah tercapai 1.27 % dari target sebesar 0.80 % atau telah tercapai sebesar 158.75 %.

Pencapaian kinerja ini didukung oleh kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Padi dimana kelompok tani mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah berupa alat pengolahan sebanyak 6 jenis.

- 3) Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung tahun 2016 dari target sebesar 2.00 %, terealisasi sebesar 5.87 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 293.50 %. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini persentase peningkatan nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung ditahun 2016 telah tercapai 5.87 % dari target sebesar 2.00 % atau telah tercapai sebesar 293.50 %. Pencapaian kinerja ini didukung oleh kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Talas.
- 4) Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung tahun 2016 dari target sebesar 3.00 %, terealisasi sebesar 5.61 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 187.00 %. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini persentase peningkatan nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung ditahun 2016 telah tercapai 5.61 % dari target sebesar 3.00 % atau telah tercapai sebesar 187.00%. Pencapaian kinerja ini didukung oleh kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Talas.
- 5) Persentase peningkatan nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri tahun 2016 dari target sebesar 10.00 %, terealisasi sebesar 15.79 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 157.90%. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini persentase peningkatan nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri ditahun 2016 telah tercapai 15.79 % dari target sebesar 10.00 % atau telah tercapai sebesar 157.90 %. Pencapaian kinerja ini didukung oleh kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Pala dengan bantuan berupa bimbingan teknis sebanyak 20 orang, alat pasca panen pala sebanyak 1 jenis, serta bangunan UPH sebanyak 1 unit.

- 6) Persentase peningkatan nilai tambah dari karet mentah menjadi sheet kering tahun 2016 dari target sebesar 5.00 %, terealisasi sebesar 6.25 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 125.00%. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini persentase peningkatan nilai tambah dari karet mentah menjadi sheet kering ditahun 2016 telah tercapai 6.25% dari target sebesar 7 % atau telah tercapai sebesar 89.28 %. Pencapaian kinerja ini didukung oleh kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Karet dengan bantuan peralatan pasca panen karet antara lain alat produksi karet sebanyak 6jenis dan 2 unit pengolahan karet berupa rumah asap dan bangunan pengolah karet.
- 7) Persentase peningkatan nilai tambah dari kopi gelondongan basah menjadi berasan tahun 2016 dari target sebesar 5.00 %, terealisasi sebesar 9.09 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 181.80%. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini persentase peningkatan nilai tambah dari kopi gelondongan basah menjadi berasan ditahun 2016 telah tercapai 9.09 % dari target sebesar 5.60 % atau telah tercapai sebesar 162.32 %. Pencapaian kinerja ini didukung oleh kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Kopi di Kecamatan Sukamakmur dan Tanjungsari dengan bantuan berupa alat pengolah kopi sebanyak 7 jenis.

Dalam mewujudkan sasaran keempat "**Berkembangnya usaha kayu dan non kayu rakyat**" untuk mewujudkan misi pertama "**Meningkatkan produksi, kualitas, dan nilai tambah produk pertanian dan kehutanan**" diperoleh melalui penjabaran indikator sasaran sebanyak 4 (empat) indikator sasaran, antara lain :

- 1) Cakupan usaha kayu rakyat tahun 2016 dari target sebesar 42 %, terealisasi sebesar 40 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 95.24%. Kondisi tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja

tahun 2016, dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 89.29 %, naik sebesar 5.95 % menjadi 95.24 % pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini cakupan usaha kayu rakyat ditahun 2016 telah tercapai 40 % dari target sebesar 42 % atau telah tercapai sebesar 95.28 %. Pencapaian kinerja ini didukung oleh kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Kayu Rakyat serta kegiatan Pengelolaan Industri Primer Hasil Hutan dengan bantuan berupa alat pengolahan kayu sebanyak 4 set dan fasilitasi sertifikasi usaha kayu rakyat untuk 3 kelompok.

2) Cakupan usaha non kayu :

- a. Usaha jamur kayu tahun 2016 dari target sebesar 18 %, terealisasi sebesar 24 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 133.33 %. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini cakupan usaha non kayu ditahun 2016 telah tercapai 24 % dari target sebesar 18 % atau telah tercapai sebesar 133.33%. Hal ini didukung oleh kegiatan Pengembangan Agribisnis Aneka Usaha Kehutanan Non Kayu, kegiatan Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan Non Kayu.
- b. Usaha lebah madu tahun 2016 dari target sebesar 15 % terealisasi sebesar 17 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 113.33 %. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini cakupan usaha lebah madu di tahun 2016 telah tercapai 17 % dari target sebesar 15% atau telah tercapai sebesar 113.33 %. Hal ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan Non Kayu.
- c. Usaha bambu tahun 2016 dari target sebesar 12 % terealisasi sebesar 10 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 83.33 %. Target indikator kinerja tersebut pada tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 karena tidak ada bantuan fasilitasi

untuk kegiatan usaha bambu ini. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini cakupan usaha bambu di tahun 2016 telah tercapai 10 % dari target sebesar 12 % atau telah tercapai sebesar 83.33 %. Hal ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan Non Kayu yang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan bimbingan pada kelompok tani usaha bambu.

- 3) Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan tahun 2016 dari target sebesar 0,013 %, terealisasi sebesar 0,010 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 76.92 %. Kondisi tersebut konstan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan ditahun 2016 telah tercapai 0,010 % dari target sebesar 0,013 % atau telah tercapai sebesar 76.92%.
- 4) Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku tahun 2016 dari target sebesar 0,013 %, terealisasi sebesar 0,010 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 76.92 %. Kondisi tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 71.43 %, meningkat sebesar 5.49 % menjadi 76.92 % pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku ditahun 2016 telah tercapai 0,010 % dari target sebesar 0,013 % atau telah tercapai sebesar 76.92 %.

Dalam mewujudkan sasaran kelima "**Tertibnya industri kayu rakyat**" untuk mewujudkan misi pertama "**Meningkatkan produksi, kualitas, dan nilai tambah produk pertanian dan kehutanan**" diperoleh melalui penjabaran indikator sasaran sebanyak 1 (satu) indikator sasaran, antara lain :

- 1) Cakupan legalitas usaha kehutanan tahun 2016 dari target sebesar 15.00 %, terealisasi sebesar 12.00 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 80.00 %. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini cakupan legalitas usaha kehutanan ditahun 2016 telah tercapai 12.00 % dari target sebesar 15% atau telah tercapai sebesar 80.00 %. Pencapaian kinerja ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan Usaha Kayu Rakyat bantuan berupa fasilitasi sertifikasi SVLK untuk 4 kelompok tani.

Dalam mewujudkan sasaran keenam **“Terwujudnya penurunan luas lahan kritis dan kerusakan hutan”** untuk mewujudkan misi ketiga **“Mengoptimalkan kemampuan konservasi sumber daya alam”** diperoleh melalui penjabaran indikator sasaran sebanyak 2 (dua) indikator sasaran, antara lain :

- 1) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis tahun 2016 dari target sebesar 6.57 %, terealisasi sebesar 9.44 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 143.68%. Kondisi tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 303.96%, turun sebesar 160.28% menjadi 143.68 % pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini rehabilitasi hutan dan lahan kritis ditahun 2016 telah tercapai 9.44 % dari target sebesar 6.57 % atau telah tercapai sebesar 143.68 %. Pencapaian kinerja ini didukung oleh kegiatan Pendukung One Billion Indonesian Tree (OBIT), kegiatan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan, Pembuatan Sumur Resapan, kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan RHL, serta kegiatan Penanaman Vegetasi Dalam Rangka Penanganan RHL.
- 2) Kerusakan kawasan hutan tahun 2016 dari target sebesar 10 %, terealisasi sebesar 0.10 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 199 %. Capaian kinerja ini tidak terkait langsung dengan tugas pokok

dan fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, hal ini difasilitasi oleh kegiatan-kegiatan reboisasi yang dilaksanakan oleh *stakeholders* Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor yang bergerak dalam bidang kehutanan, yaitu Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat, Perum Perhutani Kelompok Pemangku Hutan (KPH) Bogor, dan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini penurunan kerusakan kawasan hutan ditahun 2016 telah tercapai 0.10 % dari target sebesar 10 % atau telah tercapai sebesar 199 %.

Berdasarkan uraian hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis di atas dapat disimpulkan, bahwa pada tahun 2016 nilai akhir pencapaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor adalah 121,11 % yang termasuk dalam skala kinerja *BAIK SEKALI*.

Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Kabupaten Bogor mewujudkan Sasaran Pertama melalui 12 (dua belas) indikator kinerja. Pagu anggaran untuk mewujudkan sasaran ini mencapai sebesar Rp. 18.362.018.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 16,812,311,858,- sehingga diperoleh realisasi anggaran sebesar 91.56 %. Oleh karena realisasi anggaran lebih kecil dari besarnya pagu anggaran maka diperoleh efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.549.706.142,- (8.44 %). Sasaran Pertama tersebut diwujudkan dalam 2 (dua) program utama, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, yang dianggarkan sebesar Rp. 14.558.632.000,- terealisasi sebesar Rp. 13,172,320,119- sehingga diperoleh realisasi anggaran sebesar 90.48 %, maka diperoleh efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1,386,311,881- (9.52 %).
- 2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, yaitu dianggarkan sebesar Rp. 3.803.386.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.639.991.739,- sehingga diperoleh realisasi anggaran sebesar 95.70%, adapun anggaran yang tidak terserap sebesar

Rp. 163,394,261,- (4.30 %). Hal ini disebabkan oleh adanya selisih penawaran harga.

Dalam mewujudkan Sasaran Kedua dengan 1 (satu) indikator kinerja. Pagu anggaran untuk mewujudkan sasaran ini mencapai sebesar Rp. 3,565,670,000,- yang terealisasi sebesar Rp. 3,424,173,151,- sehingga diperoleh realisasi anggaran sebesar 96.03 %. Oleh karena realisasi anggaran lebih kecil dari besarnya pagu anggaran maka diperoleh efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 141,496,849,- (3.96%). Sasaran Kedua tersebut diwujudkan dalam 1 (satu) program utama, yaitu Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. Disamping program tersebut diatas, sasaran kinerja ini juga didukung oleh program-program lain, yaitu:

- 1) Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan Intensifikasi Tanaman Talas.
- 2) Program peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan Pengembangan Tanaman Hias, Pengembangan Kawasan Buah, Pengembangan Sayuran, Pengembangan Tanaman Obat, Pengembangan Kopi Rakyat, Rehabilitasi Usaha Karet Rakyat, Rehabilitasi Cengkeh Rakyat, dan Pengembangan Komoditas Pala.
- 3) Program Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Talas, Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Karet, Pengembangan Pengolahan Dan Mutu Hasil Kopi, Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Pala (Atsiri Pala).

Dalam mewujudkan Sasaran Ketiga dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Pagu anggaran untuk mewujudkan sasaran ini mencapai sebesar Rp. 1,784,988,000,- yang terealisasi sebesar Rp. 1,655,310,650,- sehingga diperoleh realisasi anggaran sebesar 92.74 %. Oleh karena realisasi anggaran lebih kecil dari besarnya pagu anggaran maka diperoleh efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 129,677,350,- (7.27%). Sasaran Ketiga tersebut

diwujudkan dalam 1 (satu) program utama, yaitu Program Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan yang dianggarkan sebesar 1,784,988,000,- yang terealisasi sebesar Rp. 1,655,310,650,- sehingga diperoleh realisasi anggaran sebesar 92.74 %. Oleh karena realisasi anggaran lebih kecil dari besarnya pagu anggaran maka diperoleh efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 129,677,350,- (7.27%). Disamping program tersebut diatas, sasaran kinerja ini juga didukung oleh program lain, yaitu Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan Pengembangan Tanaman Hias, Pengembangan Kawasan Buah, Pengembangan Kopi Rakyat, Rehabilitasi Usaha Karet Rakyat, Rehabilitasi Cengkeh Rakyat, dan Pengembangan Komoditas Pala.

Dalam mewujudkan Sasaran Keempat dengan 4 (empat) indikator kinerja. Pagu anggaran untuk mewujudkan sasaran ini mencapai sebesar Rp. 823,920,000,- yang terealisasi sebesar Rp. 737,563,692,- sehingga diperoleh realisasi anggaran sebesar 89.52 %. Sasaran Keempat tersebut diwujudkan dalam 1 (satu) program utama, yaitu Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan yang dianggarkan sebesar Rp. 823,920,000,- yang terealisasi sebesar Rp. 737,563,692,- sehingga diperoleh realisasi anggaran sebesar 89.52 %. Oleh karena realisasi anggaran lebih kecil dari besarnya pagu anggaran maka diperoleh efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 86,356,308,- (10.48 %).

Dalam mewujudkan Sasaran Kelima dengan 1 (satu) indikator kinerja. Pagu anggaran untuk mewujudkan sasaran ini mencapai sebesar Rp. 497,039,000,- yang terealisasi sebesar Rp. 431,087,527,- sehingga diperoleh realisasi anggaran sebesar 86.73 %. Oleh karena realisasi anggaran lebih kecil dari besarnya pagu anggaran maka diperoleh efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 65,951,473,- (13.27%). Sasaran Kelima tersebut diwujudkan dalam 1(satu) program utama, yaitu Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan yang dianggarkan sebesar sebesar Rp. 497,039,000,- yang terealisasi sebesar Rp. 431,087,527,- sehingga diperoleh

realisasi anggaran sebesar 86,73 %. Oleh karena realisasi anggaran lebih kecil dari besarnya pagu anggaran maka diperoleh efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 65,951,473,- (13.27%).

Dalam mewujudkan Sasaran Keenam dengan 2 (dua) indikator kinerja. Pagu anggaran untuk mewujudkan sasaran ini mencapai sebesar Rp. 1,100,039,000,- yang terealisasi sebesar Rp. 1,049,683,480,- sehingga diperoleh realisasi anggaran sebesar 95.41 %. Sasaran Keenam tersebut diwujudkan dalam 1 (satu) program utama, yaitu Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yaitu dianggarkan sebesar Rp. 1,100,039,000,- terealisasi sebesar Rp. 1,049,683,480,- sehingga diperoleh realisasi anggaran 95.41%. Oleh karena realisasi anggaran lebih kecil dari besarnya pagu anggaran maka diperoleh efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 50,455,520,- (4.59 %).

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam tahun anggaran 2016, pendapatan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor adalah nihil. Belanja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 44,785,304,000,- terealisasi sebesar Rp. 42,201,811,490,- atau terserap 94.23 %. Secara garis besar realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tahun 2016 ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2016

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
A.	PENDAPATAN	0	0	0
B.	BELANJA :	44,785,304,000	42,201,811,490	94.23
	1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	13,134,242,000	12,947,413,713	98.58

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
	2. BELANJA LANGSUNG (BELANJA PROGRAM/KEGIATAN)	31,651,062,000	29,254,397,777	92.43
C.	SURPLUS / (DEFISIT)	(44,785,304,000)	(42,201,811,490)	(94.23)

Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai 12 program dan 110 kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tahun 2016 sebesar Rp. 31,651,062,000,- terealisasi sebesar Rp. 29,254,397,777,- atau terserap 92.43 %. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan biaya, serta selisih penawaran harga.

Pencapaian secara keseluruhan di tahun 2016 menunjukkan bahwa program/kegiatan telah dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat dari anggaran Belanja Langsung yang tersedia sebesar Rp. 31,651,062,000,- terealisasi sebesar Rp. 29,254,397,777,- dan rata-rata capaian sasaran sebesar 121.11 %, sehingga menunjukkan bahwa pada umumnya program/kegiatan telah dilaksanakan namun dari jumlah anggaran sebesar Rp. 44,785,304,000,- yang tidak terserap sebesar Rp. 2,583,492,510,- atau 5.76 %. Jika dibandingkan dengan tahun lalu dimana tahun 2015 efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 4,175,394,116,- atau 9.62 %. Adapun rincian realisasi fisik dan keuangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor sampai dengan Bulan Desember 2016 ditunjukkan pada Lampiran 4.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor beserta hasil-hasilnya.

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selama tahun 2016, sehingga ada program/kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan belum dilaksanakan secara efisien. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor perlu terus melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas dengan menggunakan benih unggul/bermutu, penerapan teknologi budidaya yang tepat guna, dan penanggulangan hama penyakit;
- b. Perbaikan saluran irigasi; dan
- c. Pengurangan tingkat kehilangan hasil dan peningkatan nilai tambah produk melalui teknologi panen dan pasca panen.

Demikian, semoga Laporan Kinerja ini dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2016 secara tepat waktu.